



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan PT. Freeport Indonesia

2.1.1 Sekilas Sejarah PT. Freeport Indonesia

Pada tahun 1936 Jean-Jacques Dozy, Anthon H. Colijn dan Pilot Frits J. Wissel dalam upaya mencapai Gunung Gletser Jayawijaya menemukan “Ertsberg” yang berarti Gunung Bijih, sebuah batuan hitam kokoh dengan kandungan tembaga menonjol 180 meter di atas permukaan tanah pada ketinggian 3600 meter dpl, terbesar di dunia. Dozy melaporkan penemuan tersebut dalam Jurnal Geologi Leiden tahun 1939. Karena pecah perang dunia ke-2 membuat laporan tersebut tidak menarik perhatian.

Kemudian 15 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1960 seseorang bernama Forbes Wilson menemukan laporan Dozy dan segera meluncurkan ekspedisi Freeport untuk mencari Ertsberg. Ekspedisi ini dibantu oleh Mozes Kilangin, seorang Amungme dari lembah Tsing dengan menunjukkan jalan, mengatur logistik dan mengatasi perselisihan yang terjadi di pegunungan. Lalu ditemukan bahwa Ertsberg merupakan deposit terkaya di atas permukaan tanah. Freeport mulai melakukan tambang untuk evaluasi cadangan bijih, namun memiliki beberapa tantangan yaitu bagaimana mesti mengangkat alat berat menuju daerah operasi tambang menggunakan helikopter.

Pada tahun 1963 rencana proyek tambang ditangguhkan akibat kebijaksanaan Soekarno. Tiga tahun kemudian terdapat peralihan penuh kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Pembentukan pemerintahan baru yang mendorong investasi sektor swasta serta langkah-langkah reformasi lainnya. Kemudian Freeport diundang ke Jakarta pada tahun 1966 untuk pembicaraan awal mengenai kontrak tambang di Ertsberg. Pada tanggal 5 April 1967, Menteri Pertambangan Republik Indonesia Slamet Bratana melakukan penandatanganan kontrak karya untuk masa 30 tahun, yang menjadikan PTFI sebagai kontraktor

eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi. Lalu pada tahun 1969 studi kelayakan selesai dan disetujui.

Pembangunan proyek berskala penuh mulai dilakukan pada tahun 1970, yaitu: pelabuhan, lapangan terbang, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang dibangun dengan tantangan alam yang luar biasa. Selanjutnya pada tahun 1972 dilakukan uji coba pengapalan pertama ekspor konsentrat tembaga dari Ertsberg. Pada tahun 1973 Kota Tembagapura diresmikan sebagai kota pertambangan pusat operasi yang menampung karyawan dan keluarga. Kemudian berlanjut ke tahun 1975, kegiatan eksplorasi dimulai atas cadangan bawah tanah tembaga pada Gunung Bijih Timur (GBT). Pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia membeli 8,5% saham PTFI dari *Freeport Minerals Company* dan *Investor* lain. Kemudian setelah uji kelayakan proyek tambang bawah tanah, akhirnya GBT mulai beroperasi pada tahun 1981. Kemudian pihak Freeport terus mengeksplorasi mencari cadangan baru Ertsberg dan pada akhirnya cadangan Grasberg ditemukan pada tahun 1988 yang melipatgandakan cadangan total menjadi 200 juta ton *metric*. Studi mengenai dampak lingkungan terus ditingkatkan, kemudian Gresik Cooper Smelter bergabung dan PT Smelting diumumkan pada tahun 1994.

Operasi perusahaan juga berperan dalam pembangunan kota Timika. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika masih hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, Pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak huni di jalan Kwamki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandara Udara yang sekarang menjadi kota Timika.

Di tahun 1971, Freeport membangun Bandara Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973, Freeport menunjuk Kepala

Perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai Presiden Direktur pertama Freeport Indonesia, yaitu Adi Budiarjo. Sebelumnya, Ia pernah menjabat Sekretaris Pertanahan dan Direktur Pembangunan Nasional tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, juga sebagai Sekretaris Delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam Perjanjian Renville.

2.1.2 Visi dan Misi PT. Freeport Indonesia

Adapun Visi PT. Freeport Indonesia adalah:

“Menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa.”

Misi PT. Freeport Indonesia adalah:

“Berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik-praktik pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketenteraman karyawan dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja.”

2.1.3 Elemen Utama Pendekatan dari PT. Freeport Indonesia

Sifat dari perusahaan pertambangan seperti PT. Freeport Indonesia pada dasarnya berdampak pada lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar area pertambangan. PTFI sebisa mungkin berusaha untuk mengurangi dampak tersebut melalui tindakan pengendalian dan remediasi yang mutakhir dengan membangun infrastruktur, mendukung upaya kesehatan, keselamatan dan pendidikan, serta menciptakan peluang kerja dan pengembangan usaha bagi masyarakat setempat. Produk yang dihasilkan oleh PTFI sangat penting bagi keberlanjutan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka memasok sumber daya alam yang esensial bagi generasi saat ini maupun generasi masa depan, PTFI dipandu oleh tujuan, prinsip dan kebijakan yang telah dicanangkan, serta senantiasa meningkatkan program

pembangunan berkelanjutan perusahaan. Pendekatan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, terdiri dari 3 unsur inti, yaitu: Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Sosial. Pada unsur Ekonomi, PTFI meningkatkan keahlian dalam pengoperasian, keuangan, teknologi dan rantai pasokan yang dimiliki guna menjamin keberadaan perusahaan selaku entitas bisnis yang senantiasa berkelanjutan. Pada unsur Lingkungan Hidup, PTFI mengevaluasi aspek-aspek lingkungan hidup secara terus-menerus dalam lingkaran kehidupan setiap proyek guna meminimalkan dampak-dampak negatif dan mengedepankan peluang. Pada unsur Sosial, PTFI beroperasi secara aman, serta menjunjung dan menghormati hak asasi manusia, melakukan pelibatan pemangku kepentingan *internal* maupun *external* secara terbuka dan transparan, serta memenuhi semua komitmen dalam rangka membangun kepercayaan. PTFI juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh izin operasi, serta menjamin memiliki tenaga kerja yang berdedikasi.

2.1.4 Etika Bisnis PT. Freeport Indonesia

Etika bisnis PT. Freeport Indonesia dituangkan dalam bentuk prinsip dan kebijakan-kebijakan, di antaranya:

2.1.4.1 Prinsip Perilaku Bisnis

Landasan dari Komitmen PT. Freeport Indonesia untuk menjaga integritas adalah prinsip perilaku bisnis yang dianut PTFI. Prinsip tersebut dirancang untuk memperkuat hal-hal yang penting dalam kehidupan berkarya sehari-hari yakni kerja keras, kejujuran, memperlakukan orang dengan adil, serta bekerja dengan aman dan beretika. PTFI menekankan etika kerja, yaitu bahwa tenaga kerja, kontraktor, serta jajaran direksi maupun komisioner PTFI harus mengikuti kode etik perusahaan mulai dari menghindari konflik kepentingan hingga mengembangkan hubungan yang positif dengan komunitas lokal. Komitmen PTFI terhadap prinsip tersebut menjadi benang merah yang mengikat semua dalam mengejar visi bersama, mulai dari manajemen senior hingga karyawan baru.

2.1.4.2 Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan PT. Freeport Indonesia dengan tegas melarang semua jenis korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan dan pihak ketiga. Korupsi dan penyuapan tidak dapat ditolelir. Karyawan dan pihak ketiga akan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi lain. Pembayaran tidak layak yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak ketiga tidak akan diganti oleh perusahaan.

2.1.4.3 Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan menjadi kerangka pedoman untuk meminimalisasi dan meningkatkan dampak lingkungan, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan dimanapun PT. Freeport Indonesia beroperasi, menaati semua peraturan yang berlaku dan berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kebijakan tersebut termasuk pula komitmen untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 bagi semua sarana operasional yang telah dicapai PTFI, mengenal dan melindungi keanekaragaman hayati serta melindungi dan melakukan remediasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab PTFI. Kebijakan tersebut mengacu pada asas-asas pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.4 Kebijakan Audit Lingkungan

PT. Freeport Indonesia melakukan program korporasi yang efektif melalui audit lingkungan yang berguna meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan menanggulangi resiko yang timbul dari potensi permasalahan lingkungan yang buruk sebagai dampak operasi perusahaan. Kebijakan Audit Lingkungan Hidup PTFI mewajibkan agar semua aset perusahaan menjalani audit *internal* setidaknya setiap dua tahun sekali, selain merinci prosedur audit lebih jauh.

2.1.4.5 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan PT. Freeport Indonesia menjabarkan tujuan PTFI untuk mencapai nihil angka kematian, cedera, dan penyakit di tempat kerja, serta menetapkan tolak ukur evaluasi kinerja PTFI dalam mencapai tujuan

tersebut. Kebijakan tersebut juga memperkuat dan menegaskan pelaksanaan audit keselamatan dan kesehatan kerja pada semua sarana.

2.1.4.6 Kebijakan Hak Asasi Manusia

Kebijakan Hak Asasi Manusia PT. Freeport Indonesia menggariskan tekad mengakui dan mengedepankan hak asasi manusia dimanapun area kerja perusahaan. PTFI berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan menjamin setiap karyawan memperlakukan semua orang di dalam dan di sekitar kegiatan operasi dengan hormat dan bermartabat.

2.1.4.7 Kebijakan Komunitas

PT. Freeport Indonesia menjalankan kegiatannya dengan cara mengedepankan hubungan positif dan terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendukung manfaat berkelanjutan dimanapun PTFI beroperasi.

2.1.5 Logo PT. Freeport Indonesia

Berikut ini Logo PT. Freeport Indonesia:

Gambar 2.1. Logo PT. Freeport Indonesia



2.2 Ruang Lingkup Kerja *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia

2.2.1 Mengenal *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia

Government Relations Department merupakan salah satu *departemen* yang dibentuk PT. Freeport Indonesia guna memberikan dukungan terhadap kelancaran

dari operasi perusahaan. Tugas utama *Government Relations Department* PTFI adalah membangun dan menjaga hubungan baik antara Pemerintah dan PTFI dan membantu PTFI dalam menjamin kelancaran operasi PTFI, khususnya dalam proses pengurusan izin-izin agar izin tersebut diperoleh tepat waktu dari pihak yang berwenang. Selain itu, *Government Relations Department* PTFI juga sebagai sarana penghubung antara Perusahaan dengan Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Mimika dan menjadi mitra pengembangan daerah Mimika.

Government Relations Department PTFI ada di tiga lokasi dengan fungsi masing-masing, di antaranya *Government Relations Department* Jakarta tugasnya berkordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat Republik Indonesia; *Government Relations Jobsite* dan Kantor Perwakilan *Government Relations* Jayapura bertugas mengurus perizinan tingkat daerah. *Government Relations Department* PTFI dipimpin oleh seorang Direktur dan *Executive Vice President, Eksternal FM* dan membawahi seorang *Vice President Government Relations* yang berkedudukan di Jakarta. *Vice President Government Relations* membawahi 5 manajer yang terbagi di beberapa tempat, yaitu 3 manajer berada di Jakarta, 1 manajer di *Jobsite*, dan 1 manajer di kantor perwakilan Jayapura.

Government Relations Department Jobsite terbagi atas 3 Divisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

- *Government Administration Support Facilities, Regulation and Admin* (GASFR)
- *Government Capacity Building Assistance* (GCBA)
- *Land and Forestry* (LAF)

2.2.2 Visi dan Misi *Government Relations Department* PT Freeport Indonesia

Visi *Government Relations Department* PT Freeport Indonesia adalah:

“Memainkan peran dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah sebagai salah satu stakeholder yang sangat berpengaruh untuk

mendukung kelancaran operasi PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang kelas dunia.”

Misi *Government Relations Department* PT Freeport Indonesia, di antaranya:

- Mendukung dan memfasilitasi Pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Mimika dalam membangun wilayah Mimika yang merupakan wilayah operasi perusahaan sebagai komitmen dari PT. Freeport Indonesia.
- Menjadi perwakilan perusahaan kepada Pemerintah agar menciptakan informasi yang baik mengenai perusahaan untuk menghindari isu-isu politik yang berkaitan dengan PT. Freeport Indonesia.



2.2.3 Struktur Organisasi *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia

Tabel 2.2. Struktur Organisasi *Government Relations Department* PTFI

